

## PEMBANGUNAN SOSIAL DI WILAYAH PESISIR SEBAGAI KOMITMEN PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING

Pivit Septiary Chandra<sup>1(a)</sup>, Abdiana Ilosa<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>a)</sup>[Pivit.s.chandra@uin-suska.ac.id](mailto:Pivit.s.chandra@uin-suska.ac.id), <sup>b)</sup>[abdiana@uin-suska.ac.id](mailto:abdiana@uin-suska.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

16-01-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

#### Kata Kunci:

Pembangunan Sosial, Wilayah Pesisir, Human Trafficking

#### Keywords:

Social Development, Coastal Areas, Human Trafficking

#### Corresponding Author:

[abdiana@uin-suska.ac.id](mailto:abdiana@uin-suska.ac.id)

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1164>

### PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensi, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pembangunan sosial yang berkelanjutan dapat menjadi komitmen efektif dalam pencegahan *human trafficking* di wilayah pesisir hal ini dikarenakan wilayah pesisir, dengan kondisi demografis dan ekonomi yang khas, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi eksploitasi manusia, baik dalam pekerja paksa, perdagangan anak maupun eksploitasi seksual. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode penelitian studi literatur review dengan menganalisis berbagai jurnal, laporan penelitian dan kebijakan terkait. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, seperti faktor penyebab perdagangan manusia, kebijakan pembangunan sosial, dan strategi intervensi. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan sosial yang terencana dan menyeluruh dapat mengurangi potensi *human trafficking* di wilayah pesisir. Melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan yang lebih baik dan peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal untuk menerapkan strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan guna menciptakan wilayah pesisir yang lebih aman dan sejahtera.

### ABSTRACT

The purpose of this research is to examine how sustainable social development can be an effective commitment to the prevention of human trafficking in coastal areas because coastal areas, with their unique demographic and economic conditions, face major challenges in addressing human exploitation, whether in forced labor, child trafficking or sexual exploitation. This qualitative research uses a literature review method that analyzes various journals, research reports, and related policies. The analysis was conducted by categorizing the findings based on key themes, such as causal factors of human trafficking, social development policies, and intervention strategies. This research emphasizes that planned and comprehensive social development can reduce the potential for human trafficking in coastal areas. Through improved economic welfare, better access to education, and improved social and economic infrastructure. Therefore, a strong commitment is needed from the government, community organizations, and local communities to implement sustainable social development strategies to create safer and more prosperous coastal areas.

(Erlinda, 2016; Nasution, 2022; Puspaningtyas, 2021; Roshaunda et al., 2019; Wiguna, 2023; Zakaria et al., 2020). Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)

menjadi isu penting saat ini, yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Erlinda, 2016; Nasution, 2022; Roshaunda et al., 2019; Wiguna, 2023).

Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dicapai melalui praktik-praktik ramah lingkungan, seperti green accounting, green human resource management, dan pengembangan ekonomi biru (blue economy) (Hasan, 2022; Nasution, 2022; Wiguna, 2023). Pembangunan berbasis masyarakat lokal juga penting untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan pembangunan (Destriapani et al., 2021; Khotimah & Mariana, 2023; Puspaningtyas, 2021; Zakaria et al., 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Azfirmawarman, 2023; Masiku et al., 2017; Muliza et al., 2017). Peningkatan IPM dapat dicapai melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan (Masiku et al., 2017; Muliza et al., 2017).

Dalam konsep pembangunan, pembangunan sosial menjadi salah satu pilar utama. Untuk itu dalam komitmennya pemerintah pusat merumuskan kebijakan untuk menyelenggarakan pembangunan sosial dan konsep kesejahteraan sosial yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dalam landasan konstitusional kita juga mengatur dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial yang mana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H dan pasal 34.

Secara filosofis daerah tertinggal adalah daerah yang kurang maju, dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan per kapita, terbatasnya infrastruktur pembangunan, kemampuan produksi dan tingkat produksi lokal, tingkatan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan rendahnya aksesibilitas karena keteringgalan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, maka

pembangunan dan pengembangan daerah-daerah tertinggal harus menjadi salah satu prioritas yang dilakukan pemerintah dengan berbagai strategi kebijakan dan program-program pembangunan (Rahardjo, 2013).

Terjadinya paradoks antara pembangunan sosial dan ekonomi (Suharto, 2011) dan menjadi masalah paling krusial saat ini. Kemiskinan dan pengangguran yang meluas sangat mudah ditemukan di negara-negara yang telah menganggap keberhasilan membangun ekonomi, teknologi dan industri. Dikarenakan adanya disintegrasikan antara pembangunan sosial dan ekonomi menjadikan masyarakat terdesak dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga menghalal segala cara dan terpengaruh dengan bujukan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi atas ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan masyarakat tertinggal.

Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat pesisir yang hidup dalam keterbelakangan dan jauh dari kata sejahtera sehingga mendekatkan wilayah pesisir menjadi daerah tertinggal (Ahmad, 2022). Dalam pencapaiannya tarap kehidupan yang layak, Masyarakat dengan terpaksa menyerahkan dirinya dalam lingkaran praktek ilegal *Human Trafficking*. Berdasarkan referensi yang diberikan, perdagangan manusia di wilayah pesisir merupakan isu signifikan yang membutuhkan respons yang komprehensif dan terkoordinasi. Referensi menyoroti beberapa aspek kunci dari masalah ini. Perdagangan manusia adalah masalah yang kompleks dan beragam yang mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perdagangan organ (Chauke et al., 2022; Stanescu et al., 2023). Ini adalah kekhawatiran global yang terus merugikan individu, keluarga, dan komunitas (Gębska, 2020; Kiros & Zeru, 2022). Di wilayah pesisir, perdagangan manusia sering dikaitkan dengan kejahatan maritim lainnya, seperti penangkapan ikan, penyelundupan, dan perdagangan narkoba ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) (Misbach et al., 2022; Saimima et al., 2022).

**Tabel 1. Jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2023**

| Modus Perdagangan Orang        | Jumlah     |
|--------------------------------|------------|
| Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 525        |
| Pekerja Seks Komersial (PSK)   | 283        |
| Eksplotasi Anak                | 69         |
| Anak Buah Kapal (ABK)          | 7          |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>884</b> |

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>

Berdasarkan tabel 1 diatas menjelaskan angka perdagangan orang/*human trafficking* pada tahun 2023 sebagian besar korban adalah perempuan dan anak. Angka ini terus meningkat seperti halnya yang telah di sampaikan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bahwa terdapat 3.703 korban TPPO yang diperkerjakan sebagai *online scamiing* sebagian besar korban terjebak melakukan pekerjaan ilegal tersebut di kamboja dan filipina. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memproteksi masyarakatnya pada tindak pidana perdagangan orang.

Pembangunan sosial di wilayah pesisir telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan sosial. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait efektivitas pembangunan sosial dalam mencegah *human trafficking*. Banyak penelitian yang menyoroti faktor ekonomi dan kemiskinan sebagai penyebab utama perdagangan manusia (Nasution, 2022; Samin et al., 2024). Tetapi kajian yang secara spesifik menghubungkan strategi pembangunan sosial dengan upaya pencegahan *human trafficking* masih terbatas.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam integrasi kebijakan pembangunan sosial dengan upaya perlindungan kelompok rentan. Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan, tetapi belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana intervensi sosial seperti peningkatan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan penguatan kapasitas komunitas dapat berkontribusi dalam mencegah perdagangan manusia (Kiros & Zeru, 2022).

Selain aspek kebijakan dan ekonomi, pendekatan pembangunan berbasis komunitas juga masih kurang dieksplorasi dalam konteks pencegahan perdagangan manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pembangunan dapat meningkatkan ketahanan sosial (Widodo, 2022), namun belum banyak studi yang mengeksplorasi bagaimana keterlibatan masyarakat pesisir dalam mencegah perdagangan manusia secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan pendekatan pembangunan sosial, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan *human trafficking* di wilayah pesisir (Chauke et al., 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode *study literatur review* untuk menganalisis bagaimana pembangunan sosial dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah *human trafficking* di wilayah pesisir. Studi literatur ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai teori, konsep serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan perdagangan manusia. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, faktor penyebab, serta strategi yang telah diterapkan di berbagai wilayah untuk mengatasi masalah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, termasuk jurnal, buku, laporan penelitian serta kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan dan menyusun informasi dari berbagai literatur. Informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan disusun untuk memahami pola serta menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks pembangunan sosial di wilayah pesisir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

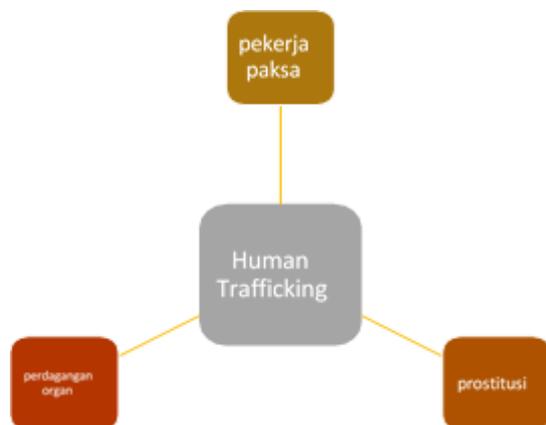
### Praktik Human Trafficking di Wilayah Pesisir

Indonesia menjadi negara kepulauan yang terbagi atas wilayah pesisir dan daratan. Pada wilayah pesisir menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, karena posisinya yang sangat strategis, dengan letak sedemikian strategis, praktis menjadikan Indonesia sebagai jalur yang padat akan lalu lintas internasional, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Jalur ini merupakan jalur penghubung sebagai macam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya oleh negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia dan Australia. Tentu saja hal ini sangat menjanjikan potensi perekonomian yang

baik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu dari segi sosial dan budaya, dengan banyaknya interaksi dengan dunia luar menjadikan Indonesia lebih dikenal dalam pergaulan internasional serta tidak menutup kemungkinan terjadinya akulturasi antar budaya Indonesia serta negara-negara sekitar yang dapat menambah ragam budaya yang ada. Akan tetapi di balik potensi yang ada dan menjanjikan keuntungan dari sisi ekonomi, sosial bahkan budaya. Letak Indonesia yang strategis ini juga menjadi momok bagi Indonesia.

Kondisi ini menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa wilayahnya seringkali dijadikan jalur yang digunakan oleh para sindikat kejahatan internasional untuk melakukan aksinya. Salah satu kejahatan tersebut adalah *Human Trafficking* atau perdagangan manusia. Yang belakangan sering kali terjadi dan adanya peningkatan jumlah transaksi dalam perdagangan manusia.

Perdagangan manusia di daerah pesisir sering kali melibatkan. Eksploitasi populasi rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terpicat oleh janji-janji palsu tentang pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik.



**Gambar 1. Jenis Pergangan Manusia yang Sering Terjadi**

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

Dari gambar 1 diatas merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dalam permasalahan perdagangan manusia/*Human Trafficking*. kegiatan/pekerjaan yang ditawarkan itu mengandung kekerasan dan intimidasi sebagai alat kontrol. Kondisi ini menciptakan siklus tidakadilan yang sulit diputus, dimana korban terjebak dalam situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka tanpa harapan untuk melarikan diri. Praktik Human

Trafficking di wilayah pesisir Indonesia merupakan masalah yang serius dan kompleks. Faktor utama yang menjadi terciptanya kegiatan perdagangan manusia di wilayah pesisir adalah kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Selain itu globalisasi dan ketimpangan pembangunan dan kurangnya penegakan hukum juga berkontribusi terhadap praktik ini.

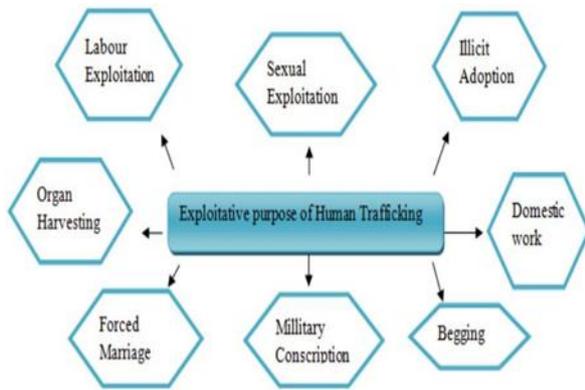


**Gambar 2. Proses kegiatan Human Trafficking**

Sumber: Deb & Sanyal, 2017

Gambar 2 diatas menjelaskan proses perdagangan manusia terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama adalah “daerah sumber atau asal”. Daerah sumber atau asal adalah tempat asal orang-orang yang diperdagangkan oleh para pedagang. asal bisa berupa desa-desa kecil, kota-kota untuk perdagangan manusia domestik atau bisa juga untuk perdagangan manusia internasional. Tahap kedua adalah “transisi”, dimana para korban tinggal selama beberapa hari atau beberapa bulan. Transit juga bisa menjadi asal untuk transportasi berikutnya. Kemudian pada tahap ketiga yaitu adalah “tahap tujuan”, dimana para korban akhirnya dipindahkan ke pemiliknya yang telah membayar sangat besar kepada pelaku perdagangan.

Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan manusia terdapat beberapa tujuan yang teresplisit. Data darbareskrim menunjukkan sedikitnya terdapat depalan jalur atau rute perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi. Malaysia dan singapura adalah dua negara yang dijadikan lokasi transit dan kemudian melanjutkan perjalanan ke negara-negara timur tengah.



**Gambar 3. Diagram Alir Tujuan Eksploitatif Perdagangan Manusia**

Sumber: Deb & Sanyal, 2017

Dengan mengidentifikasi delapan jalur tersebut, tampak bahwa masalah perdagangan manusia juga merupakan dampak dari fenomena globalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi meluasnya jaringan kejahatan, baik nasional maupun transnasional (lintas batas). Globalisasi mengaburkan batas-batas negara dan menciptakan dunia tanpa batas, yang memungkinkan individu untuk bergerak bebas tanpa hambatan apa pun. Globalisasi sebagai perubahan kemajuan juga telah mendorong berbagai perubahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan yang telah mengakibatkan meluasnya perdagangan manusia secara universal. Ironisnya perdagangan manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ini merupakan sektor perdagangan yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Nilai keuntungan yang diperolehnya menjadikan perdagangan manusia berada pada posisi ketiga setelah penyelundupan narkoba dan perdagangan senjata. Hal ini menjadi sebuah gejala bagi masyarakat di wilayah pesisir yang dekat sekali dengan kondisi kemiskinan dan keterbatasan. Himpitan sosial tersebut membuat jalur perdagangan manusia menjadi pilihan.

### Pembangunan Sosial untuk Wilayah Pesisir?

Wilayah pesisir di Indonesia, yang terbentang dari Sumatera hingga Papua, memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor perikanan dan kelautan. Namun di balik potensi tersebut, wilayah pesisir juga menghadapi sejumlah masalah sosial yang serius, salah satunya adalah perdagangan manusia (human trafficking). *human trafficking* merupakan kejahatan lintas negara yang

melibatkan eksploitasi manusia dengan tujuan memperkerjakan secara paksa, eksploitasi seksual, serta penjualan organ tubuh dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 itu sudah masuk dalam tindak pidana perdagangan orang.

Masih belum maksimalnya pengembangan kapasitas individu masyarakat di wilayah pesisir, membuat mereka memiliki kesulitan dalam peningkatan taraf kehidupan dan menciptakan kehidupan sesuai dengan pilihan hidup mereka. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembangunan sosial di wilayah pesisir yang melibatkan pemberdayaan individu dengan memberikan mereka akses ke pendidikan, kesehatan, dan kebebasan untuk membuat keputusan hidup mereka. Tanpa pembangunan sosial yang berfokus pada pemberdayaan kemampuan individu, ketimpangan sosial akan semakin meningkat, yang pada gilirannya menghalangi upaya mencapai kesejahteraan yang lebih luas di dalam masyarakat.

Pembangunan sosial menjadi sebuah konsep yang menunjukkan pada suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sejalan dengan proses pembangunan ekonomi. Artinya pembangunan sosial diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan sosialnya. Program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial sejauh ini, antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perubahan, dan pengentasan kemiskinan.

**Tabel 2. Strategi Pengentasan Human Trafficking melalui Pembangunan Sosial**

| Indikator                       | Target  | Aksi   |
|---------------------------------|---|--|
| Pemberdayaan masyarakat Pesisir | Pemberdayaan keterampilan dan pendidikan non formal | Meningkatkan akses pendidikan melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kondisi lokal, seperti pelatihan nelayan berkelanjutan, kerajinan tangan, serta keterampilan teknologi informasi untuk memperluas peluang ekonomi |
|                                 | Pemberdayaan perempuan                              | Mengembangkan program yang memberdayakan perempuan di wilayah pesisir, misalnya dengan mengajak mereka untuk terlibat dalam usaha mikro kecil menengah berbasis produk lokal atau mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan  |
|                                 | Pembentukan kelompok masyarakat                     | Membangun jaringan komunitas untuk saling berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan memberikan dukungan sosial, yang akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi  |

**Pivit Septiary Chandra & Abdiana Ilosa | Pembangunan Sosial di Wilayah Pesisir sebagai Komitmen Pencegahan Human Trafficking**

| Indikator                                   | Target  | Aksi  |
|---|---|---|
|   |   | masalah lokal   |
| Pengelolaan SDA secara berkelanjutan        | Pelestarian sumber daya alam (mangrove, terumbu karang, dan laut) | Melakukan program rehabilitasi ekosistem pesisir yang melibatkan masyarakat, seperti penanaman mangrove untuk mencegah erosi pantai, serta restorasi terumbu karang. Hal ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi melalui sektor perikanan dan pariwisata |
|   | Pendidikan lingkungan kepada masyarakat                           | Mengadakan kampanye penyuluhan tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap habitat alami  |
|   | Keterlibatan masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Alam         | Membentuk kelompok pemantau yang dilatih untuk melakukan pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau ilegal, serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.  |
| Penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi | Penyediaan akses kesehatan  | Memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan di wilayah pesisir, seperti membangun klinik atau pos kesehatan desa, serta meningkatkan pelatihan bagi tenaga medis lokal. Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular juga harus menjadi bagian dari program ini                     |
|   | Penyediaan Akses Pendidikan                                       | Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di wilayah pesisir dengan membangun sekolah-sekolah yang layak, memberikan beasiswa untuk anak-anak pesisir, dan menyediakan pelatihan kejuruan bagi pemuda untuk mengurangi angka pengangguran  |
|   | Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi             | Membangun jalan akses yang menghubungkan pesisir dengan pusat-pusat ekonomi lainnya, serta meningkatkan akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung sektor pendidikan dan pemasaran produk lokal   |
| Penguatan jaringan ekonomi lokal            | Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)              | Mendukung pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal, seperti hasil perikanan, kerajinan tangan, dan produk pariwisata. Ini bisa melibatkan bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun global                                    |
|   | Ekonomi berbasis kelautan ( <i>blue economy</i> )                 | Mengembangkan sektor ekonomi berbasis kelautan seperti budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan pariwisata pesisir yang berkelanjutan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan hasil laut menjadi bagian penting dalam model ini  |
|   | Promosi pariwisata berkelanjutan                                  | Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada keindahan alam pesisir dan keberagaman budaya lokal,   |

| Indikator                                    | Target  | Aksi  |
|--|---|---|
|  |   | dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata dan memberikan mereka manfaat ekonomi langsung  |
| Peningkatan perlindungan sosial dan keamanan | Pencegahan human Trafficking                              | Meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang bahaya perdagangan manusia, serta menyediakan layanan dukungan bagi korban perdagangan manusia. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perdagangan manusia        |
|  | Program Perlindungan Sosial dan jaminan sosial            | Menyediakan program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan (BPJS), bantuan langsung tunai, dan jaminan pensiun untuk meningkatkan keamanan ekonomi bagi masyarakat pesisir yang rentan  |
|  | Keamanan Pesisir dan hukum                                | Meningkatkan kehadiran aparat penegak hukum di wilayah pesisir untuk mengatasi masalah kejahatan laut, perompakan, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Selain itu, perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat adat dan pesisir sangat penting untuk menghindari sengketa sumber daya alam |
| Penyuluhan dan kesadaran sosial              | Penyuluhan tentang hak Asasi Manusia (HAM)                | Menedukasi masyarakat pesisir mengenai hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak pekerja, hak perempuan dan anak, serta hak-hak sosial-ekonomi   |
|  | Kesetaraan Gender   | Mengembangkan program untuk pemberdayaan perempuan, termasuk memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan dan pekerjaan yang layak. Ini juga mencakup pengurangan kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender  |
|  | Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan | menjadikan forum komunitas dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sosial dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berpengaruh ke kehidupan mereka   |

Sumber: data olahan peneliti tahun, 2024

Berdasarkan tabel 2 diatas, strategi yang telah penulis uraikan dapat menjadi sebuah model pembangunan sosial di wilayah pesisir yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang

integratif, melibatkan masyarakat, serta memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, pembangunan sosial di wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik dan mencegah masalah sosial seperti perdagangan manusia.

Pembangun sosial yang diarahkan pada keadilan ekonomi dapat membantu mengurai konflik sosial yang timbul akibat ketimpangan dan eksploitasi dalam masyarakat. Ini menjadi sebuah desakan agar tercapainya stabilitas sosial yang berkelanjutan sehingga menutup ruang bagi masyarakat di wilayah pesisir untuk menyerahkan diri mereka kepada pihak perdagangan orang dengan iming-imingan keuntungan yang besar.

Inisiatif pembangunan sosial dapat memainkan peran penting dalam mengatasi akar penyebab perdagangan manusia dengan memberdayakan masyarakat rentan dan menyediakan pendidikan, peluang ekonomi, dan sistem pendukung. Dengan meningkat kesadaran dan keterampilan di kalangan individu, inisiatif ini tidak hanya membantu mencegah eksploitasi tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua anggota Masyarakat.

## PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan sosial dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah praktik *human trafficking* di wilayah pesisir. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perdagangan manusia di wilayah ini meliputi kemiskinan, keterbatasan pendidikan, kurangnya perlindungan hukum dan ketimpangan pembangunan. Kemiskinan, ketimpangan pembangunan. Kemiskinan dan kerentanan ekonomi membuat masyarakat pesisir mudah tergiur oleh janji pekerjaan dengan imbalan yang tidak jelas, sementara rendahnya akses pendidikan menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan layak, sehingga lebih rentan dieksploitasi. Selain itu, globalisasi dan lemahnya pengawasan terhadap kejahatan transnasional menjadikan wilayah pesisir sebagai jalur utama perdagangan ilegal, termasuk *human trafficking*.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan berbagai strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM

berbasis sumber daya lokal dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Peningkatan akses pendidikan, termasuk pelatihan keterampilan bagi pemuda, juga menjadi langkah penting dalam mengurangi angka pengangguran dan mencegah terjerumus dalam perdagangan manusia. Selain itu, pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dapat menciptakan ekonomi yang stabil, sementara peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti layanan kesehatan dan akses transportasi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W. (2022). *Dimensi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat di Wilayah Pesisir*. 6(2), 4986–4994.
- Azfirmawarman, D. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(5), 117–125. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i5.22864>
- Chauke, R., Motlalekgosi, P., & Mofokeng, J. T. (2022). Exploring Police Methods and Challenges of Identifying Human Trafficking Activities in the City of Tshwane Metropolitan Municipality, South Africa. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 11(9), 250–264. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i9.2203>
- Deb, H., & Sanyal, T. (2017). Human Trafficking: An Overview with Special Emphasis on India and West Bengal. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(9), 76–97. <https://doi.org/10.9790/0837-2209057697>
- Destriapani, E., Sarwoprasodjo, S., & Sulisworo, D. (2021). Pemanfaatan Website Desa Untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). <https://doi.org/10.22500/9202137657>
- Erlinda, N. (2016). Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model Flag. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.416>

- Gębska, M. (2020). Human Trafficking as a Challenge for International Security and Security in Europe. *Torun International Studies*, 1(13), 41. <https://doi.org/10.12775/tis.2020.004>
- Hasan, H. (2022). Green Human Resources Management Untuk Keberlanjutan Perusahaan Pada Industri Penerbangan. *Jurnal Transportasi Logistik Dan Aviasi*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.52909/jtla.v2i1.91>
- Imam Gunawan, S. P. M. P. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>
- Khotimah, K., & Mariana, M. (2023). Membangun Keunggulan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Pulosari Kecamatan Jambon: Building Local Economic Excellence .... *Journal of Community Research and ...* <https://edujavare.com/index.php/Assoelta/article/view/235>
- Kiros, G., & Zeru, M. (2022). A Human Security Perspective to Human Trafficking From Ethiopia to Saudi Arabia: The Case of Atsbi Wenberta Woreda in Tigray Region. *Migration and Development*, 11(3), 560–579. <https://doi.org/10.1080/21632324.2020.1806600>
- Masiku, Y., Rochaida, E., & Wijaya, A. (2017). Pengaruh Investasi Pertambangan Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Barat. *Forum Ekonomi*, 19(1), 92. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2116>
- Misbach, A., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). The Role of Indonesia Customs in the Eradication of Iuu Fishing. *Customs Research and Applications Journal*, 3(2), 35–54. <https://doi.org/10.31092/craj.v3i2.112>
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. *J. Budg.*, 7(2). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136>
- Puspaningtyas, A. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Inklusif Dalam Mendukung Desa Wisata Budaya Di Desa Plunturan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram*, 7(2), 265–282. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i2.1216>
- Rahardjo, A. (2013). *Theories of Economic Development, Economic Growth and Regional Growth*. Science Graha.
- Roshaunda, D., Diana, L., Caroline, L. P., Khalisha, S., & Nugraha, R. S. (2019). Penilaian Kriteria Green Building Pada Bangunan Gedung Universitas Pembangunan Jaya Berdasarkan Indikasi Green Building Council Indonesia. *Widyakala Journal of Pembangunan Jaya University*, 6, 29. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i0.181>
- Saimima, I. D. S., Tobing, C. I., & Sanaky, M. S. R. (2022). Human Trafficking on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Cases as Transnational Crime on Indonesia Coastal Boundary. *JLPH*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.38035/jlph.v2i2.74>
- Soendari, T. (2012). *Metode Penelitian Deskriptif*. UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka.
- Stanescu, N., Dan, A.-N., & Taseņte, T. (2023). Human Trafficking - The Boomerang of a Decadent Society (Social Perception of Human Trafficking in Dobrogea / Constanța). *Technium Social Sciences Journal*, 44, 985–1001. <https://doi.org/10.47577/tssj.v44i1.9036>

Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Wiguna, M. (2023). Implementasi Green Accounting Dan Women on Board Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(2), 626–635.  
<https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.5716>

Zakaria, F. A., Widijatmoko, E. K., Ladamay, I., & Petu, V. K. (2020). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Desmigratif. *Jurnal Civic Education Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.36412/ce.v4i1.1872>